

SINOPSIS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak para anggota Aparatur Sipil Negara terutama hak untuk memperoleh jaminan hari tua berupa dana pensiun yang harus mereka dapatkan pada saat mereka mengakhiri masa kerjanya di suatu instansi pemerintah. Pemerintah tengah mengkaji perubahan skema program pensiun dari Pay As You Go (PAYG) menjadi Fully Funded. Perubahan sistem pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan skema fully funded. Skema ini dinilai mampu menekan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran uang pensiun fully funded merupakan sistem pembayaran penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya. Kebijakan ini juga direncanakan masuk dalam perubahan struktur gaji PNS yang tengah digodok Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum terkait dengan persepsi Aparatur Sipil Negara Tentang Pembayaran Pensiun dengan Sistem *Fully Funded* di Kabupaten Bantul 2018. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, serta bekerjasama dengan BKPP Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengolahan data berdasarkan skala indeks.

Hasil penelitian terkait dengan analisis persepsi ASN kabupaten Bantul memiliki nilai rata-rata indeks 3.12, masuk dalam kriteria cukup baik. Nilai Indeks ini diambil dari rata-rata keseluruhan 18 pernyataan yang terlampir dalam kuesioner. Kriteria cukup baik yang didapat dari hasil persepsi ASN dari 18 pernyataan didalam kuesioner memberikan kesimpulan bahwa ASN di Kabupaten Bantul cukup bisa menerima tentang peraturan sistem pembayaran pensiun dengan sistem *Fully Funded* ASN di Bantul tahun 2018. Persepsi yang positif atau mendukung atas terselenggaranya kebijakan pensiun dengan sistem *fully funded* yang diadakan oleh pemerintah RI.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan meneruskan penelitian tentang kebijakan pembayaran pensiun kepada ASN dengan sistem *Fully Funded* yang di kaitkan dengan unsur selain konten, konteks serta dampak dari kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Persepsi, Undang-Undang ASN , Putusan Pemerintah RI dan Menteri Keuangan , ASN Kabupaten Bantul.